

PENGEMBANGAN KURIKULUM JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

(PAI) DALAM UPAYA MENCETAK GURU AGAMA PROFESIONAL

(Sebuah Analisis Deskriptif dalam Konteks UUGD)

*Alhamuddin*³³

Abstrak: *Pembaharuan Pendidikan Guru di Indonesia terkait dengan kelahiran UU No.14/2005 tentang Guru dan Dosen(UUGD) yang amanat utamanya adalah profesionalisme pendidik dalam perbaikan mutu pendidikan. Fakultas Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai salah satu LPTK perlu mengantisipasi berbagai kebijakan tersebut, salah satunya ialah melalui pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan proses dinamik dan kontinyu dalam merespon tuntutan perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi serta globalisasi yang begitu cepat. Disamping itu, pengembangan kurikulum harus diikuti oleh sistem manajemen yang baik pula, sehingga tercipta efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan pengembangan tersebut.*

Kata Kunci: *Pengembangan, Kurikulum, Pendidikan, Agama, Islam, PAI, Guru*

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia sedang menghadapi krisis multidimensional. Dari hasil berbagai kajian disiplin dan pendekatan, tampaknya ada kesamaan pandangan bahwa segala macam krisis itu berpangkal dari krisis akhlak atau moral. Krisis ini, secara langsung atau tidak, berhubungan dengan pendidikan. Kontribusi pendidikan dalam konteks ini adalah pada pembangunan mentalitas manusia yang merupakan produknya. Dan sementara pihak menyebutkan bahwa krisis tersebut karena kegagalan pendidikan agama, termasuk didalamnya pendidikan agama Islam.

Untuk mengantisipasi berbagai krisis tersebut, maka pembelajaran agama Islam di sekolah maupun perguruan tinggi harus menunjukkan kontribusinya. Hanya

³³STIT Al-Ishlah Bondowoso; mahasiswa Sekolah Pascasarjana (S3) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Prodi Pengembangan Kurikulum. Email: alham_83.yahoo.co.id.

saja perlu disadari bahwa selama ini terdapat berbagai kritik terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam yang sedang berlangsung.

Muchtar Buchori (1992) dalam Muhaimin³⁴, menilai pendidikan agama masih gagal. Kegagalan ini disebabkan karena dalam prakteknya pendidikan agama hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai agama, dan mengabaikan pembinaan aspek afektif dan *konatif-volatif*, yakni kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai –nilai ajaran agama. Dengan perkataan lain, pendidikan agama lebih berorientasi pada belajar tentang agama, dan kurang berorientasi pada belajar bagaimana cara beragama yang benar. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan, antara *gnosis* dan *praxis* dalam kehidupan nilai agama. Dalam praktik, pendidikan agama berubah menjadi pengajaran agama, sehingga tidak mampu membentuk pribadi-pribadi bermoral, padahal inti dari pendidikan agama adalah pendidikan moral³⁵. Amin Abdullah³⁶ :

Pendidikan agama selama ini lebih terkonsentrasi pada persoalan-persoalan teoritis keagamaan yang bersifat kognitif, dan kurang *concern* terhadap persoalan bagaimana mengubah pengetahuan agama yang kognitif menjadi ”makna” dan ” nilai” yang perlu diinternalisasikan dalam diri peserta didik lewat berbagai cara, media, maupun forum

Disamping itu, Rasdijannah³⁷ mengemukakan beberapa kelemahan dari pendidikan agama Islam di sekolah, baik dalam pemahaman materi pendidikan agama Islam maupun dalam pelaksanaannya, yaitu

(1) dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada paham fatalistik; (2) bidang akhlak yang berorientasi pada urusan sopan santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi manusia beragama; (3) bidang ibadah diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan kurang ditekankan sebagai proses pembentukan kepribadian; (4) dalam bidang hukum (*fiqih*) cenderung dipelajari sebagai tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam; (5) agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan kurang mengembangkan rasionalitas

³⁴ Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada. Hal. 23.

³⁵ Harun Nasution. (1995). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta. UI-Press. Hal. 428.

³⁶ Amin Abdullah. (1998). *Problem Epistemologies-Metodologis Pendidikan Islam*. Dalam Abd Munir Mulkhan, *et.al. Rligiusitas Iptek*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Hal.49-65.

³⁷ Andi Rasdijannah. (1995). *Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam pada Acara Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Bandung, 11 September 1995. Hal. 4-7.

serta kecintaan pada kemajuan ilmu pengetahuan; (6) orientasi mempelajari Al-Qur'an masih cenderung pada kemampuan membaca teks, belum mengarah pada pemahaman arti dan penggalan makna

Berbagai kritik tersebut mendeskripsikan kondisi pendidikan agama Islam yang selama ini berjalan di lapangan. Intinya bahwa pengajaran pendidikan agama lebih banyak bermuara pada aspek metodologi pembelajaran PAI dan orientasinya yang lebih bersifat normatif, teoretis dan kognitif. Dan kelemahan tersebut dipengaruhi beberapa faktor diantaranya ialah; (1) kecilnya jumlah jam pelajaran agama (hanya dua jam dalam seminggu untuk tingkat SLTP dan tiga jam untuk tingkat SLTA/SMK); (2) sumber belajar dalam hal ini buku. Menurut Muhaimin³⁸, buku teks yang ada saat ini lebih banyak disusun dengan menggunakan disiplin ilmu yang mengutamakan kekayaan atau kelengkapan isi, bukan pendekatan metodologi pembelajaran sehingga terlihat tidak ada kaitan antara bab yang lain atau antara bagian yang satu dengan bagian yang lain lebih rinci; (3) lemahnya etos kerja guru atau tenaga pendidik PAI; (4) minimnya ketersediaan dana; dan, (5) sarana prasarana pendukung pembelajaran PAI yang ada di Sekolah atau Madrasah.

Dari beberapa faktor diatas, menurut hemat penulis akar permasalahannya terletak pada tenaga pendidik atau gurunya. Mengingat, keberhasilan pembelajaran sangat ditentukan oleh proaktif guru.

Pendidik atau guru merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan untuk terselenggaranya proses pendidikan. Keberadaan guru merupakan pelaku utama sebagai fasilitator penyelenggaraan proses belajar siswa. Oleh karena itu kehadiran dan profesionalisme seorang guru sangat berpengaruh dalam mewujudkan program pendidikan nasional.

Hasil studi Heyneman dan Loxly dalam Dedi Supriadi³⁹ yang dilakukan di 29 Negara menunjukkan bahwa diantara berbagai masukan yang menentukan keberhasilan pendidikan (prestasi siswa) lebih dari sepertiganya ditentukan oleh

³⁸ Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*. Bandung. Remaja Rosdakarya. Hal. 188.

³⁹ Supriadi Dedi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa. Hal. 178.

guru. Menurut studi tersebut di 16 negara yang sedang berkembang (India, Mesir, Bosnia, Thailand, Chile, El Salvador, Kolombia, Meksiko, Brazil, Argentina, Peru, Uganda, Hongaria, Paraguay, Iran, dan Bolivia) guru memberikan kontribusi terhadap prestasi belajar sebanyak 34 %, manajemen 22 %, waktu belajar 18 %, dan sarana fisik 26 %. Sedangkan di 13 negara industri (Amerika Serikat, Inggris, Skotlandia, Belanda, Jerman, Swedia, Belgia, yang meliputi 3 kelompok etnis, Selandia Baru, Australia, Italia, dan Jepang) kontribusi guru 36 %, manajemen 23%, waktu belajar 22%, dan sarana fisik 19%.

Menurut UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 39 ayat 3 dinyatakan sebagai berikut:

Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan bimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di Perguruan Tinggi

Kemudian Undang-Undang tersebut diperkuat oleh Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, pada pasal 1 dinyatakan bahwa;

Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah

Selanjutnya, LPTK dan fakultas Tarbiyah harus mampu menghasilkan tenaga-tenaga kependidikan yang sesuai dengan amanat UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 dan UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. Dan berdasarkan Undang-Undang yang terakhir dijelaskan bahwa defenisi guru profesional setidaknya memiliki empat kompetensi dalam menjalankan tugas. Kompetensi tersebut ialah; kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional.

Kurang berhasilnya LPTK dan Fakultas Tarbiyah selama ini menghasilkan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi seperti disebutkan diatas disebabkan

sedikitnya lima masalah; *pertama*, beban kurikulum yang terlalu berat; *kedua*, beban perkuliahan yang terlalu berat; *ketiga*, sempit dan terbatasnya kesempatan untuk mendalami berbagai bahan perkuliahan tersebut; *keempat*, sedikitnya pilihan atas subjek-subjek yang betul-betul esensial untuk dipelajari peserta didik dan terbatasnya metode dan cara-cara mempelajarinya; *kelima*, sistem penilaian (*assesment*) dan evaluasi yang cenderung menilai dan mengukur hafalan dan verbalismen belaka⁴⁰ (Akibat kelima hal ini, mahasiswa umumnya dan lulusan LPTK khususnya kehilangan imajinasi dan kreativitas intelektualnya.

Dengan demikian, Azra⁴¹, menyatakan bahwa kurikulum dan PBM yang diselenggarakan hendaknya ditinjau kembali. Dan difokuskan pada pembinaan lulusan yang memiliki berbagai kompetensi, *pertama*, kompetensi keilmuan yang mencakup kecerdasan intelektual, sehingga ia mampu mentransfer ilmu dan pengetahuan secara benar dan baik; *kedua*, kompetensi profesional agar ia mampu menyelenggarakan PBM yang efektif; *ketiga*, kompetensi personal yang mencakup kecerdasan emosional dan kecerdasan spritual. Hal tersebut berguna agar ia dapat menjadi teladan bagi peserta didiknya; *keempat*, kompetensi sosial yang mencakup kecerdasan sosial. Sehingga ia mampu memahami dinamika sosial dan lingkungannya, serta dapat memberikan respon yang memadai dan tepat.

Salah satu upaya mengatasi berbagai permasalahan diatas dan untuk memenuhi tuntutan Undang-Undang Guru dan Dosen adalah dengan pengembangan kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) secara relevan, sehingga para lulusanya diharapkan dapat memiliki seluruh kriteria seorang guru agama profesional dengan berbagai kompetensi yang diperoleh dari bangku kuliah.

Hal ini tidak lain karena kurikulum merupakan rencana pendidikan yang akan diberikan kepada mahasiswa. Bahkan dalam pengertian yang lebih luas, keberadaan kurikulum tidak saja terbat pada materi yang akan diberikan di dalam ruang kuliah, melainkan juga meliputi apa saja yang sengaja diadakan atau ditiadakan untuk

⁴⁰ Azyumardi Azra. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta. Kompas. Hal. 52-53.

⁴¹ *Loc. cit*

dialami mahasiswa di dalam kampus⁴². Oleh karena itu, posisi kurikulum sebagai mata rantai yang urgen dan tidak dapat begitu saja dinafikan dalam konteks peningkatan kualitas perguruan tinggi⁴³

Selanjutnya pengembangan kurikulum pun tidak dapat dilaksanakan dengan baik, tanpa diikuti oleh sistem manajemen pengembangan kurikulum yang baik pula. Atas dasar inilah, maka penulis akan mencoba membatasi permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan singkat ini, yaitu masalah manajemen pengembangan kurikulum ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen; perencanaan (*plan*), pengorganisasian (*organizing*), implemementasi (*actuating*), dan evaluasi (*controlling*) Sehingga akan membuahkan sebuah hasil penelitian yang dapat memberikan alternatif seputar pengembangan kurikulum

B. Manajemen Pengembangan Kurikulum

1. Perencanaan

Kurikulum perguruan tinggi atau sekolah akan memberikan dampak yang sangat positif apabila penyusunannya benar-benar didasarkan pada kajian yang komprehensif terhadap fakta-fakta yang berasal dari perguruan tinggi atau sekolah itu sendiri, orang tua, masyarakat, para ahli, mahasiswa dan lingkungannya. Dari dalam perguruan tinggi /sekolah yang perlu dikaji adalah keberadaan sumberdaya manusia yang dimiliki, mahasiswa, serta fasilitas pendukung yang dimiliki. Dari sisi orang tua adalah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah ekonomi keluarga, pendidikan orang tua, dan keinginan serta kebutuhannya. Kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat sekitar, serta kondisi geografi dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dari sebuah kajian yang komprehensif tersebut akan muncul suatu pengetahuan tentang isu-isu strategis yang sedang berkembang dan tuntutan yang dibutuhkan

⁴² Oemar Hamalik. (2007). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung. PT.Remaja Rosdakarya. Hal. 4. Romine (1954) “ *curriculum is interpreted to mean all of organized courses, activities, and experiences which pupils have under direction of the schools, whether in the classroom or not*”. Senada dengan pendapat tersebut, Trimurti (Pendiri Pondok Modern Gontor Ponorogo) mengatakan bahwa kurikulum adalah “*segala yang dilihat, didengar, dan diperhatikan santri dipondok ini adalah untuk pendidikan*” yang bisa diambil dan ditanamkan dalam jiwa mereka (santri) untuk membentuk kepribadian dari segi akal, akhlaq, jasmani dan faktor pendidikan lainnya.

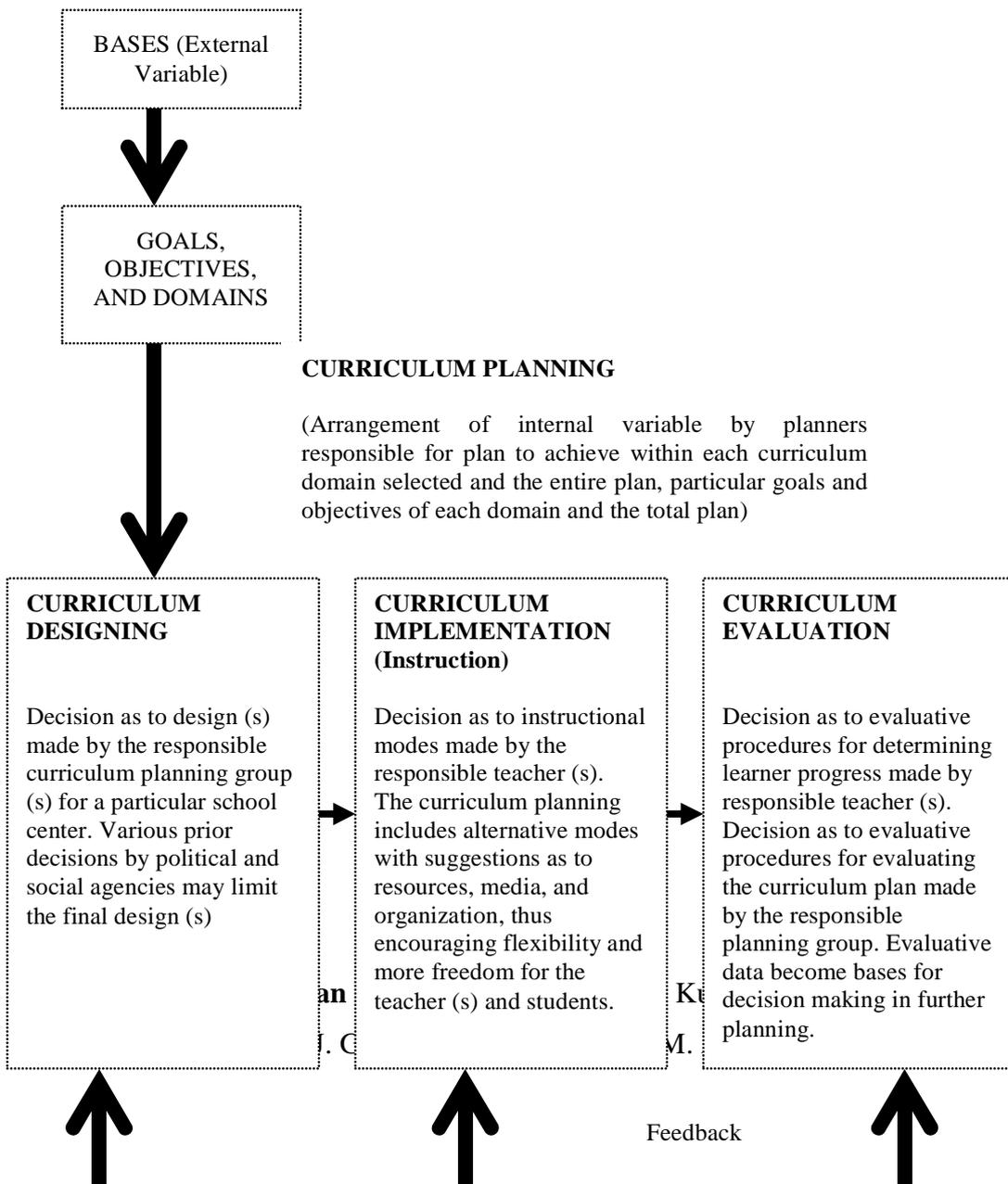
⁴³ A.Furqan. (2007). *Anatomi Problem Kurikulum di PTAL*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia. Hal. 1

oleh calon lulusan. **Karl Manheim** dalam Fadjar⁴⁴, mengemukakan bahwa untuk memahami pendidikan perlu diperhatikan siapa mendidik siapa?, di masyarakat apa?, bilamana dan dimana serta untuk posisi sosial apa peserta didik itu dididik?. Beberapa pertanyaan mendasar tersebut menjadi kerangka dasar dalam merencanakan suatu kurikulum pendidikan agar fungsi dan tujuan pendidikan dapat tercapai.

Bentuk perencanaan tersebut diatas, sejalan dengan konsep perencanaan kurikulum yang digagas oleh : J. Galen Saylor and William M. Alexander⁴⁵ seperti pada gambar 1. b. berikut:

⁴⁴ A.M.Fadjar. (2009). *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*. Malang. UMM-Press. Hal. 15.

⁴⁵ J Galen Saylor dan William M Alexander. 1981). *Planning Curriculum for School*. London. Holt. Rinehart and Winston. Hal. 27.



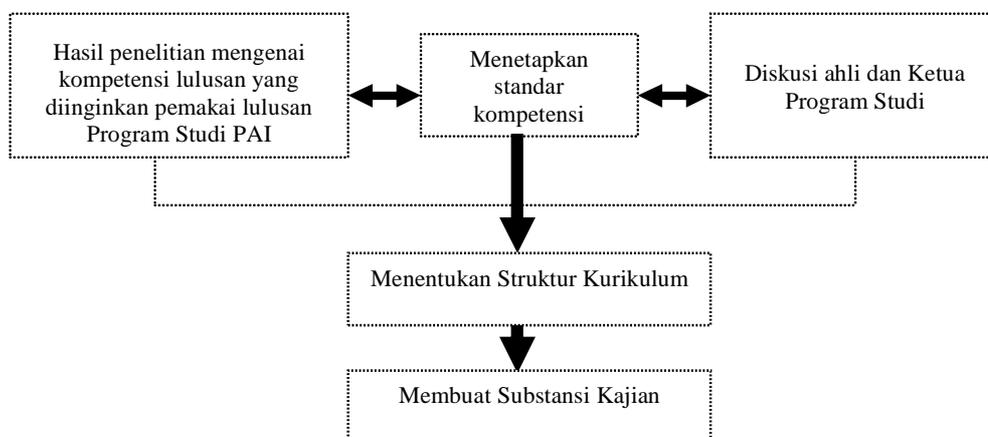
2. Pengorganisasian

Organisasi kurikulum ialah pola atau bahan desain kurikulum yang tujuannya untuk mempermudah mahasiswa mempelajari bahan kuliah serta mempermudah mahasiswa dalam melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif.

Format Kurikulum menurut keputusan Mendiknas, yaitu dengan pengelompokkan kurikulum ke dalam lima komponen yaitu: MPK (matakuliah pengembangan kepribadian), MKK (matakuliah keilmuan dan keterampilan), MKB (matakuliah keilmuan berkarya), MPB (matakuliah perilaku berkarya) dan MBB (matakuliah berkehidupan bersama).. Inti dari format keputusan Mendiknas tersebut adalah sepaham dengan pendidikan UNESCO, bahwa pembelajaran itu mengarahkan peserta didik untuk mengetahui (*learning to know*), berbuat (*learning to do*), menjadi diri sendiri (*learning to be*), dan belajar untuk hidup bersama (*learning how to live together*). Seperti yang diungkap Furchan⁴⁶, keempat pilar ini dapat dipahami secara taksonomi, yakni klasifikasi hubungan komponen-komponen secara hirarkis. Format kurikulum diatas dikembangkan berdasarkan pendekatan sistemik (*systemic approach*), menyeluruh dan kemitraan. Pendekatan sistemik adalah proses pencapaian hasil secara efektif dan efisien atas dasar kebutuhan-kebutuhan yang ada. proses tersebut meliputi pengidentifikasian kebutuhan dan masalah, alternatif pemecahan masalah,. Adapun karakteristik suatu pendekatan sistem adalah memiliki tujuan, fungsi, komponen, interaksi dan efek sinergik, dipengaruhi oleh sistem yang lain, mengalami proses transformasi, umpan balik, dan sifat relatif.

⁴⁶ A.Furchan. *et.al.* (2005). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka. Pelajar. Hal. 66.

Perumusan pendekatan ini dapat ditunjukkan pada gambar 2 .b.berikut ini:



Bagan 2.b.: Pendekatan Sistematis-Sistemik Pengembangan Kurikulum

Adaptasi dari Furchan (2005; 69)

3. Implementasi

Implementasi kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dari pengembangan kurikulum, sedangkan pelaksanaan kurikulum itu direalisasikan dalam proses belajar mengajar sesuai dengan prinsip-prinsip dan tuntutan yang telah dikembangkan. Untuk itu, proses pelaksanaan di lapangan memerlukan tahapan perencanaan pelaksanaan yang matang, agar kurikulum tersebut membawa dampak ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi, misi, dan tujuan yang hendak dicapai secara bersama.

Dalam mensukseskan implementasi kurikulum di lapangan diperlukan langkah-langkah atau prosedur yang strategis agar bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Mulyasa⁴⁷ mengatakan bahwa sedikitnya terdapat tujuh (7) jurus yang perlu diperhatikan dalam mensukseskan pelaksanaan kurikulum di lapangan, yaitu: (1) mensosialisasikan perubahan kurikulum; (2) menciptakan lingkungan yang kondusif; (3) mengembangkan fasilitas dan sumber belajar; (4) mendisiplinkan peserta didik; (5) mengembangkan kemandirian pimpinan; (6)

⁴⁷ E.Mulyasa. (2004). *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung. Remaja Rosdakarya.. Hal. 13.

mengubah paradigma (pola pikir) dosen; (7) memberdayakan tenaga kependidikan.

Sementara itu, Hamalik⁴⁸ menegaskan bahwa ada beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh lembaga pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum, faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi implementasi kurikulum di lapangan. *Pertama*. Karakteristik kurikulum, yang mencakup ruang lingkup, bahan ajar, tujuan, fungsi, sifat, dan sebagainya. *Kedua*. Strategi implementasi, yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi kurikulum seperti diskusi profesi, seminar, penataran, lokakarya, penyediaan buku, dan berbagai kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum di lapangan. *Ketiga*. Karakteristik pengguna kurikulum, yang meliputi pengetahuan, keterampilan, serta nilai dan sikap dosen terhadap kurikulum dalam pembelajaran.

Selain faktor-faktor diatas, ada beberapa komponen yang termuat dalam rencana pelaksanaan kurikulum, diantaranya: (1) studi program baru; (2) identifikasi sumber daya; (3) penetapan peran; (4) pengembangan profesional; (5) penjadwalan; (6) sistem komunikasi; (6) pelaksanaan monitoring⁴⁹. Beberapa langkah strategis, faktor-faktor, serta komponen dalam rencana pelaksanaan kurikulum tersebut merupakan suatu hal yang utama dan penting untuk diperhatikan oleh para pengembang kurikulum.

4. Evaluasi

Evaluasi atau penilaian kurikulum adalah suatu sistem pengumpulan dan penerimaan informasi berdasarkan data yang tepat, cepat, akurat dan lengkap tentang pelaksanaan kurikulum yang dilaksanakan melalui langkah-langkah yang tepat dalam jangka waktu tertentu oleh pemantau yang ahli dan berpengalaman untuk mengatasi persoalan yang timbul dalam kurikulum.

Adapun, evaluasi kurikulum bertujuan untuk mengetahui; hingga mana mencapai kemajuan dan tujuan yang telah ditentukan, menilai efektivitas

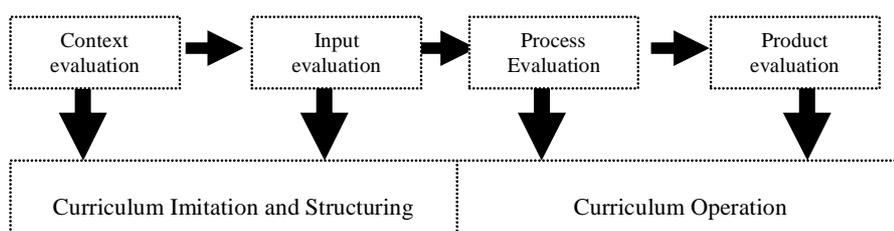
⁴⁸ Oemar Hamalik. (2007). *Op.Cit.* Hal. 239.

⁴⁹ *Ibid.* Hal. 244.

kurikulum, dan menentukan faktor biaya, waktu, dan tingkat keberhasilan pelaksanaan kurikulum di lapangan.

Salah satu model evaluasi kurikulum yang dapat digunakan adalah model yang dikembangkan dan digagas oleh **Stufflebeam** (1969)⁵⁰, yaitu model CIPP (*Content, Input, Process, dan Product*). Model ini adalah model evaluasi yang bertujuan untuk membantu dalam perbaikan kurikulum, tetapi juga sebagai alat untuk mengambil keputusan apakah program tersebut diberhentikan.

Model ini mengutamakan evaluasi formatif yang kontinyu sebagai cara untuk meningkatkan hasil belajar. Namun fokus penilaian bukan hanya hasil belajar melainkan keseluruhan kurikulum serta lingkungannya (CIPP) (Nasution, 2006: 95). Model ini mengandung empat komponen, yakni konteks, input, proses, dan produk, dan masing-masing perlu penilaian sendiri. **Konteks** meliputi penelitian mengenai lingkungan perguruan tinggi serta pengaruh-pengaruh dari luar. Bila evaluasi ini memadai, maka dievaluasi **Input**, yakni meliputi strategi implementasi kurikulum ditinjau dari segi efektivitas dan ekonomi. Kemudian dilakukan evaluasi **proses** dan **produk**, misalnya kongruensi antara rencana kegiatan dan kegiatan yang nyata. Selanjutnya keempat komponen evaluasi kurikulum tersebut dapat ditunjukkan dalam gambar berikut:



Bagan 3.d.: Model Evaluasi Kurikulum Stufflebeam

Sumber: Curtis R. Finch & Jhon R. Crunkilton (tt: 294)

⁵⁰ Curtis R. Finch & Jhon R. Crunkilton. (tt). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education; Planning, Content, and Implementation*. Boston London. Allyn and Bacon. Hal; 294.

C. Penutup

Berdasarkan pemaparan singkat di atas, penulis menggaris bawahi bahwa perlu adanya *framework of thinking* (kerangka pikir) yang jelas dalam pengembangan kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan, serta berimplikasi pada peningkatan mutu dan kualitas; baik lulusan maupun perguruan tinggi itu sendiri. Hal yang perlu diperhatikan bahwa pengembangan kurikulum bukan sekedar melakukan inovasi dan perubahan sejumlah mata kuliah, jumlah SKS atau lainnya, tetapi yang lebih penting adalah harus diikuti dengan perubahan-perubahan dalam *actual curriculum*. *Wallahu a'lam bil as-Showab*.

KEPUSTAKAAN

- Abdullah,Amin..(1998). “Problem Epistemologies-Metodologis Pendidikan Islam” dalam Abd Munir Mul Khan, *et.al. Rligiusitas Iptek*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Ali, M. (2008). *Pengembangan Kurikulum di Sekolah*. Bandung. Sinar Bbaru Algensindo.
- Allen & Unwwin. (1993). *Curriculum Development and Design. Second Edition*. Australia. Murray Print.
- Azra, A. (2006). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta. Kompas.
- Barnes, D. (1982). *Practical Curriculum Study*. London. Routledge & Kegan Paul.
- Dedi, Supriadi. (1999). *Mengangkat Citra dan Martabat Guru*. Yogyakarta. Adicita Karya Nusa
- Fadjar, A. M. (2009). *Pergumulan Pemikiran Pendidikan Tinggi Islam*. Malang. UMM Press.
- Finch R.C. & Crunkilton R.J. (tt). *Curriculum Development in Vocational and Technical Education; Planning, Content, and Implementation*. Boston London. Allyn and Bacon.
- Furchan, A. *et.al.* (2005). *Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi di Perguruan Tinggi Agama Islam*. Yogyakarta. Pustaka. Pelajar.
- Furqan, A. (2007). *Anatomi Problem Kurikulum di PTAI*. Jakarta. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Islam. Departemen Agama Republik Indonesia.
- Griffin. (1998). *Management*. India. A.I.T.B.S. Publishers & Distributors.
- Hamalik,O. (2008). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung. Remaja Rasdakarya.
- Harun Nasution. (1995). *Akal dan Wahyu dalam Islam*. Jakarta. UI-Press.

- Idi, A. (1999). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Jakarta. Gaya Media Pratama.
- McNeil, J. D. (1977). *Curriculum a Comprehensive Introduction*. Boston. Little Brown & Co, inc.
- Miller, J. P & Seller W. (1985). *Curriculum Perspective and Practice*. New York. Longman Inc.
- Muhaimin. (2001). *Paradigma Pendidikan Islam Upaya Mengefektifkan Pendidikan Agama di Sekolah*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2005). *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Mulyasa, e. 2004). *Implementasi Kurikulum 2004 Panduan Pembelajaran KBK*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. (2008). *Asas-Asas Kurikulum Cet- 9*. Jakarta. Bina Aksara.
- Nurgiyantoro, B. (1988). *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah; Sebuah Pengantar Teoretis dan Pelaksanaan*. Yogyakarta. BPFE.
- Olivia, P.F. (1988). *Developing The Curriculum*. Scott Foresman and Company, Glenview.
- Permendiknas Republik Indonesia No. 18/2007, Tentang *Sertifikasi Bagi Guru dalam Jabatan*.
- Permendiknas Republik Indonesia No. 16/2007, Tentang *Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*.
- Rasdijanah, Andi. . (1995). Butir-Butir Pengarahan Dirjen Bimbaga Islam pada Acara *Pelatihan Peningkatan Wawasan Ilmu Pengetahuan dan Kependidikan Bagi Dosen Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum*. Bandung, 11 September 1995
- Saylor, G. J & Alexander M. W. (1981). *Planning Curriculum for School*. London. Holt. Rinehart and Winston.

Sukmadinata, N. Sy. (1997). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung. Remaja Rosdakarya.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 14/2005, Tentang *Guru dan Dosen*.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20/2003 , Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*.

Unruh, GG & Unruh, A. (1984). *Curriculum Development*. Berkeley, California. McCuthan Publishing Co.

Zais, R S. (1976). *Curriculum Principles and Foundations*. New York. Harper & Row Publisher.